



## PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN, DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Kumba Digdowiseiso<sup>1)</sup>, Bambang Subiyanto<sup>2)</sup>, Reza Dwi Cahyanto<sup>3)</sup>

<sup>1</sup>Program Studi SI Manajemen Universitas Nasional, kumba.digdo@civitas.unas.ac.id

<sup>2</sup>Program Studi SI Akuntansi Universitas Nasional, bambangsubiyanto@gmail.com

<sup>3</sup>Program Studi SI Akuntansi Universitas Nasional, rezadwicahyanto22@gmail.com

### Info Artikel :

Diterima : 10 Desember 2021

Disetujui : 14 Desember 2021

Dipublikasikan : 28 Januari 2022

### Kata Kunci:

Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah pada periode 2015-2019. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan Dana Perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah.

### Keywords:

Local Own-Source Revenue, Balancing Fund, Capital Expenditure, Financial Performance of Local Government

### ABSTRACT

This study aims to analyze the effects of Local Own-Source Revenue, Balancing Fund, and Capital Expenditure on Financial Performance of Regency and City Governments in Central Java Province over the period 2015-2019. The population in this study were all regencies and cities in Central Java Province. The results of the study indicate that both Local Own-Source Revenue and Capital Expenditure have a positive and significant effect on the Financial Performance of Regency and City Governments in Central Java Province. Meanwhile, the Balancing Fund has a negative and significant effect on the Financial Performance of Regency and City Governments in Central Java Province.

## PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur semua urusan pemerintahan daerah masing-masing. Pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan penyelenggaraan dan tata kelola yang baik dengan memperhatikan prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan, serta keistimewaan dan keanekaragaman daerah. Penyelenggaraan pemerintah yang baik salah satunya dapat dilihat dari kinerja keuangan. Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat

dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal.

Pendapatan Asli Daerah merupakan sektor yang perlu digali oleh pemerintah daerah untuk mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat. Berdasarkan data APBD pemerintah provinsi Jawa Tengah Tahun 2016, angka Pendapatan Asli Daerah masih belum mencapai target yang ditetapkan. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah hanya mencapai 90,39%. Ketidaktercapaian PAD ini merupakan imbas dari rendahnya Pendapatan Pajak Daerah yang terealisasi.

Selain Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan juga merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap struktur APBD. Dalam fenomena yang terjadi di lapangan, tingkat ketergantungan keuangan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat masih cukup tinggi. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, ketergantungan daerah terhadap Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) secara nasional masih sangat tinggi. Secara rata-rata, pada tahun 2019, ketergantungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah terhadap TKDD mencapai 80,1 %. Sementara itu, pada tahun yang sama, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah hanya sekitar 12,87 %. Persentase penerimaan daerah atas Dana Perimbangan yang masih di atas 80 % menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah terhadap pemerintah pusat masih relatif tinggi.

Masalah lain yang terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah adalah rendahnya persentase dana yang digunakan untuk Belanja Modal. Berdasarkan APBD Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah pada Tahun Anggaran 2019, dana yang digunakan untuk Belanja Modal secara rata-rata hanya mencapai 11,38 %. Angka tersebut bahkan masih jauh di bawah target (yakni, 30 %), yang mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD. Hal tersebut dikarenakan masih tingginya proporsi anggaran untuk belanja operasi, terutama belanja gaji pegawai, belanja barang, dan belanja hibah.

Berdasarkan fenomena tersebut, penulis menduga bahwa rendahnya realisasi Pendapatan Asli Daerah, tingginya ketergantungan fiskal, dan rendahnya belanja modal turut berdampak pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sehingga perlu diteliti lebih lanjut. Pada konteks ini, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yang diukur menggunakan analisis rasio keuangan, mengacu pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

## KAJIAN TEORI

### **Teori *Stewardship***

Teori *stewardship* menggambarkan situasi dimana manajemen tidak termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi (Donaldson & Davis, 1991). Menurut teori ini, manajer dalam bertindak harus mengacu pada kepentingan bersama. Pada konteks ini, pemerintah adalah *steward*, yang bertindak sebagai pengelola sumber daya, sedangkan rakyat adalah *principal*, yang bertindak pemilik sumber daya. Seiring berjalannya waktu, terjadi kesepakatan antara pemerintah (*steward*) dan rakyat (*principal*) berdasarkan pada kepercayaan dan bersifat kolektif sesuai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam penelitian ini, *stewardship theory* menjelaskan eksistensi Pemerintah Daerah sebagai lembaga yang dipercaya rakyat untuk melaksanakan tugas dan fungsinya

dengan tepat termasuk dalam pengelolaan keuangan, yang mampu bertindak secara ekonomis dan efisien dalam memanfaatkan sumber daya seluas-luasnya untuk kepentingan bangsa.

### **Teori Signaling**

Menurut Brigham dan Houston (2014), *signaling theory* merupakan suatu tindakan yang diambil perusahaan untuk memberi petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Sinyal ini berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik.

Dalam penelitian ini, *signaling theory* menjelaskan bahwa pemerintah daerah sebagai penerima mandat/amanah dari rakyat akan berusaha untuk memberikan sinyal yang baik kepada masyarakat berupa kinerja keuangan daerah. Kinerja keuangan yang baik menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah telah menjalankan amanat yang diberikan oleh masyarakat.

### **Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Menurut Halim (2004), Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Penilaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sangatlah diperlukan untuk penentuan efektivitas operasional, organisasi, dan karyawan/pegawai berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya secara periodik. Beberapa rasio untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah adalah Rasio Kemandirian, Rasio Ketergantungan, dan Rasio Desentralisasi Fiskal. Pada penelitian ini, penulis menggunakan rasio desentralisasi fiskal

### **Pendapatan Asli Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Hubungan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah menurut jenis pendapatan terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang berperan penting di dalam pembangunan yang diperoleh dan digali dari potensi sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu, semakin tinggi besaran pendapatan asli daerah di dalam APBD, maka semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat, yang pada akhirnya berimplikasi pada semakin membaiknya kinerja keuangan pemerintah daerah. Mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Mahendra (2018) dan Suseno (2018), kami menyusun hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>1</sub>: PAD berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.**

### **Dana Perimbangan**

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Hubungan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mendefinisikan Dana Perimbangan sebagai dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan

kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dengan adanya Dana Perimbangan, kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (*vertical fiscal imbalance*), serta antar pemerintah daerah (*horizontal fiscal imbalance*) diharapkan dapat berkurang sehingga tidak ada daerah yang tertinggal. Selain itu, Alokasi Dana Perimbangan juga diharapkan akan meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah sehingga meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan kinerja keuangan pemerintah daerah. Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dana Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil yang diterima oleh pemerintah daerah terdiri dari dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil sumber daya alam. Sementara itu, Dana Alokasi Umum didefinisikan sebagai dana perimbangan untuk daerah yang sudah dialokasikan dalam APBN berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan neto dalam negeri, yang telah ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu yang menekankan pada aspek keadilan dan pemerataan yang selaras dengan pembangunan pemerintah. Sedangkan, Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Suseno (2018), kami menyusun hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>2</sub>: Dana perimbangan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.**

### **Belanja Modal**

Halim (2004) menyatakan bahwa belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Suatu belanja dapat dikategorikan sebagai belanja modal jika: a) Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap dan aset lainnya sehingga dapat menambah aset lainnya; b) Pengeluaran tersebut melebihi batas minimal kapitalis aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah; dan c) Perolehan aset tersebut diniatkan bukan untuk dijual.

Belanja modal merupakan salah satu indikator produktifitas dari penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah. Semakin besar persentase alokasi belanja modal menandakan bahwa pemerintah daerah lebih produktif dalam melaksanakan pembangunan di daerahnya. Oleh karenanya, penggunaan aset yang dihasilkan selalu bersinggungan dengan pelayanan publik dan digunakan oleh masyarakat umum. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal diklasifikasikan dalam lima jenis belanja, yaitu Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan, dan Belanja Aset Tetap Lainnya. Mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Armaja et al. (2017), kami menyusun hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>3</sub>: Belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.**

## METODE PENELITIAN

### Jenis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis data sekunder yang bersifat kuantitatif. Sementara itu, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi JawaTengah yang terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) Kabupaten dan 6 (enam) Kota dengan periode waktu 5 tahun dari mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, dengan total data sebesar 175 (35 Kabupaten/Kota × 5 tahun). Data kemudian diolah dengan menggunakan SPSS versi 25.0.

### Pengukuran

**Tabel 1. Definisi Operasional**

Variabel	Definisi	Indikator dan Pengukuran
Pendapatan Asli Daerah (X1)	Pendapatan yang bersumber dari potensi pendapatan daerah yang digali berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku dan digunakan membiayai kebutuhan daerah	$PAD = PD + RD + HPKD + LPD$ PAD = Pendapatan Asli Daerah PD = Pajak Daerah RD = Retribusi Daerah HPKD = Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan LPD = Lain-lain PAD yang sah
Dana Perimbangan (X2)	Dana yang diberikan kepada pemerintah daerah yang bersumber dari APBN untuk membantu membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi	Dana Perimbangan = Dana Bagi Hasil + Dana Alokasi Umum + Dana Alokasi Khusus
Belanja Modal (X3)	Pengeluaran pemerintah untuk memperoleh aset tetap dan aset lain yang memberikan manfaat lebih dari dua belas bulan dengan tujuan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan	Belanja Modal = Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan Mesin + Belanja Gedung dan Bangunan + Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan + Belanja Aset Tetap Lainnya
Kinerja Keuangan (Y)	Indikator untuk menilai hasil kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan aktivitas keuangannya sesuai ketentuan undang-undang	Derajat desentralisasi = $\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Pengujian

**Tabel 2. Uji Normalitas *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test***

		<i>Unstandardized Residual</i>
N		175
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	0,03848984
Most Extreme Differences	Absolute	0,046
	Positive	0,045
	Negative	-0,046
Test Statistic		0,046
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 <sup>c,d</sup>

Dari tabel 2, dapat dianalisa bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sebagai variabel Y memberikan tingkat probabilitas yang digambarkan oleh nilai Asymp. Sig. (2-tailed) yaitu sebesar  $0,200 > 0,05$ . Hal ini mengindikasikan bahwa distribusi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah normal dan model regresi layak digunakan untuk memprediksi pengaruh Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Perimbangan (X2), dan Belanja Modal (X3).

**Tabel 3. Uji Multikolinieritas**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Pendapatan Asli Daerah	0,565	1,770
Dana Perimbangan	0,516	1,937
Belanja Modal	0,413	2,421

Berdasarkan tabel 3, dapat dilihat bahwa nilai *Tolerance* Pendapatan Asli Daerah (X1) adalah sebesar  $0,565 > 0,10$ , Dana Perimbangan (X2) sebesar  $0,516 > 0,10$ , dan Belanja Modal (X3) sebesar  $0,413 > 0,10$ . Selain itu, nilai VIF Pendapatan Asli Daerah (X1) adalah sebesar  $1,770 < 10,0$ , Dana Perimbangan (X2) sebesar  $1,937 < 10,0$ , dan Belanja Modal (X3) sebesar  $2,421 < 10,0$ . Oleh karenanya, dapat dianalisa bahwa tidak terjadi multikolinieritas atau tidak adanya hubungan antar variabel independen dalam penelitian ini.

**Tabel 4. Uji Heteroskedastisitas**

Model	R	R Square	Adjusted R-Squared	Std. Error of the Estimate
1	,260 <sup>a</sup>	0,067	0,045	0,00167

Dari tabel 4, dapat dilihat bahwa nilai R Square yang didapatkan adalah 0,067. Oleh karenanya, nilai chi-square hitung sebesar 11,725 ( $0,067 \times 175$ ). Sedangkan, nilai chi-square tabel sebesar 205,779 sehingga dapat kita analisa bahwa nilai chi-square hitung lebih kecil ( $<$ ) daripada nilai chi-square tabel. Hal ini mengindikasikan bahwa model regresi dalam penelitian ini layak dipakai.

**Tabel 5. Uji Autokorelasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,905 <sup>a</sup>	0,820	0,817	0,03092	1,937

Dari tabel di atas, nilai *Durbin-Watson* (d) diperoleh sebesar 1,937. Sementara itu, pada tabel *Durbin-Watson* diperoleh nilai dU sebesar 1,7877 dan dL sebesar 1,7180 sehingga nilai 4-dU yaitu sebesar 2,212 ( $4 - 1,788$ ). Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa nilai *Durbin-Watson* (d) terletak diantara dU dan  $4 - dU$  yaitu  $dU < d < 4 - dU$  ( $1,788 < 1,937 < 2,212$ ). Hal ini membuktikan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak menunjukkan gejala autokorelasi baik positif maupun negatif.

**Tabel 6. Uji Anova**

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1,362	3	0,454	418,707	,000 <sup>b</sup>
Residual	0,185	171	0,001		
Total	1,548	174			

Berdasarkan tabel 6, nilai  $F_{hitung}$  yang diperoleh adalah sebesar 418,707. Sedangkan nilai  $F_{tabel}$  dengan melihat tabel F diperoleh sebesar 2,66. Dengan demikian, nilai  $F_{hitung}$  lebih besar daripada nilai  $F_{tabel}$  ( $F_{hitung} = 418,707 > F_{tabel} = 2,66$ ) dan nilai signifikansi yang didapatkan adalah sebesar  $0,000 < \alpha = 0,05$ . Maka dapat ditelaah bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal secara bersama-sama (simultan) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015-2019.

**Tabel 7. Koefisien Determinasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin - Watson
1	,938 <sup>a</sup>	0,880	0,878	0,03293	1,378

Berdasarkan table 7, nilai koefisien determinasi (*Adjusted R-squared*) sebesar 0,878 yanberarti bahwa 87,8 % Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y) dipengaruhi oleh variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Perimbangan (X2), dan Belanja Modal(X3) sebesar 87,8%, sedangkan sisanya sebesar 12,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

## PEMBAHASAN

**Tabel 8. Multiple Linear Regression Model**

Model	Unstandardize d Coefficients		Standardize d Coefficient s	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	0,874	0,221		3,949	0,000
LnPAD	0,229	0,008	0,999	28,360	0,000
LnDAPER	-0,263	0,011	-0,911	-24,729	0,000
LnCAPEX	0,020	0,009	0,092	2,240	0,026

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa nilai t-hitung X1 adalah  $28,360 > t\text{-tabel} = 1,9739$ , yang menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (X1) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y). Dengan kata lain, semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah yang mampu dihasilkan oleh Pemerintah Daerah, maka Kinerja Keuangan yang dicapai oleh Pemerintah Daerah juga akan semakin meningkat. Tingginya Pendapatan Asli Daerah akan mendorong Pemerintah Daerah untuk lebih mandiri dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahannya. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini mendukung temuan penelitian dari Mahendra (2018) dan Suseno (2018).

Sementara itu, nilai t-hitung Dana Perimbangan (X2) mencapai  $-24,729 < t\text{-tabel} = -1,9739$  yang semakin mengindikasikan bahwa Dana Perimbangan (X2) berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y). Dengan kata lain, semakin tinggi Dana Perimbangan yang diterima oleh Pemerintah Daerah, maka Kinerja Keuangan yang dicapai oleh Pemerintah Daerah juga akan semakin menurun. Hal ini dikarenakan banyaknya bantuan Dana Perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat yang berdampak pada turunnya tingkat kemandirian suatu daerah. Penelitian ini mendukung hasil temuan dari Suseno (2018).

Di sisi lain, nilai t-hitung belanja modal (X3) adalah  $2,240 > t\text{-tabel} = 1,9739$ , yang menunjukkan bahwa Belanja Modal (X3) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y). Dengan kata lain, semakin tinggi Belanja Modal yang dianggarkan oleh Pemerintah Daerah, maka akan semakin tinggi juga Kinerja Keuangan yang dicapai oleh Pemerintah Daerah. Tingginya Belanja Modal yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah akan berdampak pada peningkatan fasilitas dan potensi daerah yang kemudian akan meningkatkan penerimaan daerah serta mendorong tercapainya Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yang baik. Penelitian ini mendukung hasil temuan yang dilakukan oleh Armaja et al. (2017).

## KESIMPULAN

Penelitian ini mencoba untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil menunjukkan bahwa H1 diterima. Ini berarti bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015-2019. Disamping itu, hasil



menunjukkan bahwa H2 diterima. Ini mengindikasikan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015-2019. Juga, penulis menemukan bahwa H3 diterima. Ini membuktikan bahwa Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015-2019.

Pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah diharapkan dapat terus meningkatkan usaha intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah melalui potensi yang dimiliki masing-masing daerah baik dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, maupun dari potensi lainnya yang valid menurut ketentuan perUndang-Undangan. Pemerintah daerah juga diharapkan untuk menggunakan Dana Perimbangan secara efektif dan efisien dengan mengalokasikan anggaran secara adil dan merata. Disamping, mereka diharapkan dapat meningkatkan pembangunan fasilitas dan layanan publik yang baik melalui peningkatan alokasi anggaran untuk Belanja Modal mengingat fasilitas dan layanan publik merupakan sarana yang strategis dalam pembangunan ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Armaja, Ibrahim, R., & Aliamin. (2017). Pengaruh Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan (Studi pada Kabupaten/Kota di Aceh). *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 3(2), 168-181.
- Brigham, E.F., & Houston, J.F. (2014). *Essentials of Financial Management*. Singapore: Cengage Learning.
- Donaldson, L., & Davis, J.H. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. *Australian Journal of Management*, 16(1), 49-64.
- Halim, A. (2004). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.
- Mahendra, A. (2018). Analyze the Effect of General Allocation Funds, Revenue Sharing Funds and Regional Original Income to Regional District Expenditure in North Sumatera Province. Retrieved from <https://www.scitepress.org/Papers/2018/94931/94931.pdf>.
- Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Hubungan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Suseno, A. A. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2012-2016). Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Bandung: Universitas Pasundan.